

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA-135.04.2.692047/2025**

A. Dasar Hukum :

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran :

1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
 2. Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
 3. Provinsi : (05) JAWA TIMUR
 4. Kode>Nama Satker : (692047) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR
- Sebesar :Rp. 5.038.044.000,00 (Lima Milyar Tiga Puluh Delapan Juta Empat Puluh Empat Ribu RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN

03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

135.04.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
135.04.BF.7110 Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 5.038.044.000,00

Rp. 5.038.044.000,00

C. Sumber Dana Berasal Dari:

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|------------------|--------------------------------|-----|------|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 0,00 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0,00 |
| 2. PNBP | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0,00 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 5.038.044.000,00 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0,00 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0,00 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0,00 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0,00 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0,00 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0,00 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0,00 |
| | | | 6. SBSN PBS | Rp. | 0,00 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN Surabaya II (135) Rp. 5.038.044.000,00

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-135.04.2.692047/2025
I A. INFORMASI KINERJA

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode / Nama Satker : (692047) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR

Halaman IA.1

Jakarta Selatan, 2 Desember 2024
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.

WIDODO

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-135.04.2.692047/2025
I B. SUMBER DANA**

Kementerian Negara/Lembaga: (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (692047) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR

Halaman IB.1

						Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	5.038.044.000,00	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US\$	0,00	Rp.	0,00
1. Rupiah Murni	Rp.	0,00			(2) RPLN	US\$	0,00	Rp.	0,00
2. PNBP	Rp.	5.038.044.000,00		b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US\$	0,00	Rp.	0,00
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0,00			(2) RHLN	US\$	0,00	Rp.	0,00
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0,00		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR	0,00		
5. Hibah Langsung	Rp.	0,00		d. Hibah Dalam Negeri		IDR	0,00		
6. SBSN PBS	Rp.	0,00		e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR	0,00		
				f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR	0,00		

2. Rincian Pinjaman/Hibah :

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp. LN	Rp. Loc. Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-135.04.2.692047/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**

Kementerian Negara / Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode / Nama Satker : (692047) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR
Kewenangan : (KD) KANTOR DAERAH

Halaman II.1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/AKTIVITAS/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
692047	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR	-	5.038.044,00	-	-	-	5.038.044,00		
135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	5.038.044,00	-	-	-	5.038.044,00		
7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	-	5.038.044,00	-	-	-	5.038.044,00		
7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	2.096.186,00	-	-	-	2.096.186,00	05.51	
04	<i>PNBP</i>	-	2.096.186,00	-	-	-	2.096.186,00	135@	RM
7110.BCB	Perkara Hukum Lembaga (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	44.736,00	-	-	-	44.736,00	05.51	
04	<i>PNBP</i>	-	44.736,00	-	-	-	44.736,00	135@	RM
7110.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (05.51 JAWA TIMUR / KOTA SURABAYA)	-	2.897.122,00	-	-	-	2.897.122,00	05.51	
04	<i>PNBP</i>	-	2.897.122,00	-	-	-	2.897.122,00	135@	RM
	JUMLAH	-	5.038.044,00	-	-	-	5.038.044,00		

Jakarta Selatan, 2 Desember 2024
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

,
ttd.

WIDODO

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-135.04.2.692047/2025
IV A. B L O K I R**

Kementerian Negara / Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : [05] JAWA TIMUR
Kode / Nama Satker : [692047] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
692047	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PNP) 1.920,00
	<i>Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 983.113,00</i>		Catatan
	52 BELANJA BARANG DAN Rp. 983.113,00		<i>Tidak dapat dicairkan Rp. 960,00</i>
135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		<i>Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</i>
7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah		<i>Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</i>
7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	7110.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PNP) 519.588,00		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PNP) 180.234,00
	Catatan		Catatan
	<i>Tidak dapat dicairkan Rp. 259.794,00</i>		<i>Tidak dapat dicairkan Rp. 90.117,00</i>
	<i>Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</i>		<i>Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</i>
	<i>Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</i>		<i>Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</i>
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PNP) 85.300,00		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PNP) 303.200,00
	Catatan		Catatan
	<i>Tidak dapat dicairkan Rp. 42.650,00</i>		<i>Tidak dapat dicairkan Rp. 151.600,00</i>
	<i>Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</i>		<i>Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</i>
	<i>Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</i>		<i>Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</i>
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (PNP) 368.020,00		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (PNP) 465.148,00
	Catatan		Catatan
	<i>Tidak dapat dicairkan Rp. 184.010,00</i>		<i>Tidak dapat dicairkan Rp. 232.574,00</i>
	<i>Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</i>		<i>Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</i>
	<i>Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</i>		<i>Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</i>
7110.BCB	Perkara Hukum Lembaga		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PNP) 42.816,00		
	Catatan		
	<i>Tidak dapat dicairkan Rp. 21.408,00</i>		
	<i>Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</i>		
	<i>Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</i>		

Jakarta Selatan, 2 Desember 2024
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.

WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-135.04.2.692047/2025
IV B. C A T A T A N

Kementerian Negara / Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : [05] JAWA TIMUR
Kode / Nama Satker : [692047] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta Selatan, 2 Desember 2024
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

WIDODO